

**TINJAUAN HUKUM TENTANG KERAJINAN TANGAN SARUNG
DONGGALA SEBAGAI PRODUK INDIKASI ASAL**

SARIANTI / D 101 07 464

ABSTRAK

Judul dari skripsi ini adalah " Tinjauan Hukum Tentang Kerajinan Tangan Sarung Donggala Sebagai Produk Indikasi Asal ". Sedangkan yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah Sarung Donggala memenuhi syarat sehingga dapat dikategorikan sebagai produk yang termasuk rezim Indikasi Asal (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum sarung Donggala sebagai bagian hak merek dan apa yang merupakan kendalanya (3) Bagaimana perlindungan Sarung Donggala sebagai Indikasi Asal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian Kain tenun Donggala atau sarung Donggala merupakan salah satu hasil kerajinan tradisional Kabupaten Donggala yang sudah terkenal di seluruh Nusantara. Sarung Donggala termasuk kedalam rezim Indikasi Asal karena menggunakan nama tempat atau daerah asal produk tersebut dan menjadi ciri khas daerah tersebut sebagai prinsip Indikasi Asal yang dilindungi sebagai tanda dan Indikasi Asal dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan, tetapi tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

Kata Kunci : Sarung Donggala, Produk Indikasi Asal, HKI dan Merek

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan semakin majunya berbagai hal yang dikategorikan sebagai hak kekayaan intelektual (HKI), maka peraturan perundang-undangan yang menyangkut HKI mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terjadi setelah berakhirnya era paling dingin antara blok Amerika Serikat dengan blok Uni Soviet.¹ Dampak perkembangan tersebut juga terjadi di Indonesia, hal tersebut berawal sejak Indonesia meratifikasi *World Trade Organization* (WTO) berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Salah satu bagian dalam WTO adalah persetujuan *Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Dengan demikian Indonesia harus menyesuaikan Undang-undang HKI-nya dengan TRIPs, sehingga dengan demikian ada beberapa jenis HKI yang belum dikenal dalam sistem hukum di Indonesia harus dibuat Undang-undangnya, yakni Undang-undang Rahasia Dagang.

Salah satu Undang-undang HKI yang mengalami perubahan adalah Undang-undang Merek, yang memasukan salah satu Pasal Indikasi Asal sebagai salah satu rezim Merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang 15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya disingkat UUM). Dari rumusan kedua Pasal tersebut dapat di pahami bahwa yang dimaksud dengan Indikasi Asal adalah suatu tanda yang menunjukkan asal suatu barang, yang karena

¹Imam Soedjoko, *Pengantar Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Grafiis, Jakarta, 1992, hlm. 2.

faktor daerah dan faktor manusia, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Indikasi Asal merupakan salah satu rezim HKI yang mengatur tentang tanda suatu produk sehingga tampak jelas karakter khusus dari produk itu dipengaruhi secara esensial oleh tempat asalnya. Tanda ini biasanya terdiri dari nama asal produk, tetapi juga dapat terdiri dari simbol atau penanaman langsung menunjuk kepada tempat asal produk tersebut. Tempat asal tersebut seringkali menjadi jaminan keunikan dan kualitas produk, sehingga dengan mengindikasikan tempat asalnya, nilai ekonomis produk tersebut juga meningkat. Secara teoritis, produk yang potensial untuk dilindungi rezim indikasi asal berupa produk-produk dapat berupa barang-barang kerajinan tangan dan makanan selama produk-produk tersebut mengusung nama tempat asal dan kualitasnya secara nyata dipengaruhi karakteristik tempat asal tersebut.

Indikasi asal merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai secara lisan atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk bernilai unik di benak masyarakat, khususnya konsumen, yang tau bahwa tempat itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk. Contohnya Sarung Donggala, Batik Pekalongan, Sarung Mandar, Coto Makassar, dan Sate Madura. Perlindungan Indikasi asal memiliki beberapa aspek hukum yang membuatnya amat relevan untuk dikembangkan di Indonesia. Selain sebagai rezim HKI yang masih paling terbuka terhadap pengaruh ragam budaya yang berbeda-beda. Indikasi asal juga amat menghargai keterkaitan historis dari suatu produk dan tempat asalnya dan karakter pemilikan Indikasi asal bersifat kolektif. Aspek-aspek itu membuat Indikasi asal amat potensial untuk difungsikan sebagai perekat produk kepada daerah asal, sehingga produk yang dilindunginya dapat tetap memberi keuntungan ekonomis tinggi bagi produsen asli daerah asal produk tersebut.

Beberapa daerah,² perlindungan Indikasi asal ini telah secara nyata mengangkat kesejahteraan produsen-produk di dalam suatu lokalitas tertentu yang letaknya terpencil dan hanya memiliki alternatif mata pencaharian yang amat sedikit. Aspek-aspek khusus indikasi asal ini sudah tentu merupakan aspek-aspek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia, yang dikenal dengan keragaman budaya, akar historis, produk yang kuat, budaya kepemilikan kolektif, kepentingan untuk tetap menguasai produk-produk daerahnya sendiri. Karakter kepemilikan kolektif atau komunalistik dengan nilai-nilai ketimuran dan ke Indonesiaan yang lebih menghargai kepemilikan bersama daripada kepemilikan pribadi. Keharusan adanya kaitan atau hubungan yang erat antara nama atau indikasi produk dengan kondisi daerah asal produk dalam rezim indikasi asal tampak sejalan dengan sifat-sifat hukum masyarakat adat yang selalu menjunjung kebergantungan dan kelekatan eksistensinya dengan daerah asal. Potensi Indikasi asal ini dapat dikembangkan untuk melindungi produk-produk masyarakat adat dan komunitas lokal yang umumnya memang dinamai bukan dengan nama individu, tetapi nama tempat asal suatu produk yang akan dilindungi dengan Indikasi asal. Dari manfaat-manfaat tersebut diatas, tampak jelas bahwa perlindungan Indikasi asal penting untuk dikembangkan di Indonesia. Saat yang paling tepat untuk memulainya juga adalah saat ini, ketika Indonesia sudah menandatangani perjanjian TRIPs dan masyarakat Indonesia umumnya mulai tidak memiliki banyak pilihan selain mengoptimalkan potensi disekitar dan dalam lingkungan sendiri.

Sehubungan dengan uraian diatas, sejak berpuh-puluh tahun yang lalu sampai saat ini keberadaan sarung Donggala sebagai salah satu ikon Kabupaten Donggala yang sudah dikenal secara nasional bahkan si mancanegara, serta mendapatkan pemasaran yang cukup signifikan. Merujuk pada bentuk

²Contohnya Tembakau Deli Di Sumatera Utara, Kopi Arabika di Tana Toraja.

Indikasi Asal dilihat dari segi rezim Hak Kekayaan Intelektual Sarung Donggala dapat dikategorikan sebagai produk yang berbasis Indikasi Asal, karena produk Sarung Donggala menggunakan nama “Donggala” sebagai penunjuk tempat asalnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Sarung Donggala memenuhi syarat sehingga dapat dikategorikan sebagai produk yang termasuk rezim Indikasi Asal ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum sarung Donggala sebagai bagian dari hak merek ?

II. PEMBAHASAN

A. Sarung Donggala Sebagai Produk Yang Termasuk Rezim Indikasi Asal

Dalam literatur hukum *Anglo Saxon* dikenal istilah *intellectual property rights*. Istilah hukum tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi 2 (dua) macam: Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perbedaan terjemahan terletak pada kata *property*. Kata tersebut memang dapat diartikan sebagai kekayaan, dapat juga sebagai milik. Bila berbicara tentang kekayaan selalu tidak terlepas dari milik, dan sebaliknya berbicara tentang milik tidak terlepas dari kekayaan. Dengan demikian, kedua terjemahan sebenarnya tidak berbeda dalam arti, hanya berbeda dalam kata. Jadi, terjemahan mana yang mau dipakai terserah kepada selera penulis dan pembaca. Pembentuk undang-undang menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan Indonesia.³ Hak Kekayaan Intelektual⁴ adalah

sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern. Seperti juga pada aspek-aspek lain yang memberi warna kepada kehidupan modern misalnya masalah lingkungan hidup serta persaingan usaha, hak kekayaan intelektual merupakan konsep yang relatif baru bagi sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang. Namun, pada ujung abad ke 20 dan awal abad ke 21 tercapai kesepakatan negara-negara untuk mengangkat konsep hak kekayaan intelektual ke arah kesepakatan bersama dalam wujud *Agreement Establishing the World Organization (WTO Agreement)* dan segala perjanjian internasional yang menjadi lampirannya, termasuk yang menyangkut hak kekayaan intelektual,⁵ termasuk yang berkaitan dengan *Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPS-WTO)*.

Kain tenun Donggala atau sarung Donggala merupakan salah satu hasil kerajinan tradisional Kabupaten Donggala yang sudah terkenal di seluruh Nusantara. Dikatakan tenun tradisional, karena proses pembuatannya dilakukan secara tradisional dengan peralatan yang tradisional dilakukan oleh kaum perempuan di Donggala. Sarung Donggala adalah kain tenun khas daerah Donggala, yang disebut Buya Sabe. Bunyi hentakan balida yang bertemu dengan pasak alat tenun tradisional adalah bunyi suara khas Desa Limboro, Kecamatan Banawa Tengah, Donggala. Balida adalah sebuah kayu ulin atau eboni panjang yang menjadi pemberat di tengah lipatan kain tenun saat penenun memasukkan benang-benang. Alat Tenun Sarung Donggala Buya Sabe atau Sarung Donggala, yang bahan bakunya benang sutra. Dibuat oleh para perempuan paruh baya berusia 50 – 60 tahun dan gadis remaja berusia 12-20 tahun. Coraknya beragam. Antara lain, kain palekat garusu, buya bomba, buya sabe, kombinasi bomba dan sabe. Corak Buya bomba yang paling sulit, dapat membutuhkan waktu pengerjaan hingga dua bulan. Tenun Buya Sabe bisa ditunen di sepanjang Desa

³Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.1.

⁴Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No.M.03.PR.07 tshn 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor. 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak kekayaan Intelektual” (tanpa “atas”), telah resmi dipakai.

⁵Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1

Watusampu, Limboro, Salu Bomba, Tosale, Towale dan Kolakola di sebelah barat Kota Donggala Sulawesi Tengah.⁶

B. Bentuk Perlindungan Hukum Sarung Donggala Sebagai Bagian Hak Merek

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi pembentukan *World Trade Organization* (selanjutnya disingkat WTO) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Konsekuensi Indonesia menjadi anggota WTO antara lain, adalah melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan WTO, termasuk yang berkaitan dengan *Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (TRIPs-WTO).⁷ Persetujuan TRIPs-WTO juga memuat berbagai norma dan standar perlindungan bagi karya-karya intelektual. Disamping itu TRIPs-WTO juga mengandung pelaksanaan penegakan hukum dibidang hak kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat HKI). Oleh karena itu sudah seharusnya Sarung Donggala sebagai produk yang termasuk kedalam Indikasi Asal mendapatkan perlindungan Hukum.

Ketentuan mengenai gugatan dan penetapan sementara atas pelanggaran merek dan indikasi-geografis berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemegang hak atas indikasi-asal.⁸ Oleh karena itu, ketentuan mengenai indikasi geografis berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap indikasi-asal, ini berarti bahwa pada dasarnya kedudukan indikasi asal sama dengan indikasi geografis, hanya saja indikasi asal tidak didaftarkan.⁹ Timbul dalam benak kita pertanyaan bagaimana dengan masa perlindungan indikasi asal yang tidak disinggung dalam Undang-undang Merek. Mengenai hal ini harus ditafsirkan bahwa masa perlindungan indikasi asal sama dengan masa indikasi geografis

karena pemegang indikasi asal pun diberi hak untuk mengajukan gugatan maupun penetapan sementara sebagaimana yang berlaku pada indikasi geografis.

Pengaturan Perlindungan indikasi asal sama dengan perlindungan indikasi geografis hanya perbedaannya indikasi asal tidak didaftarkan, hal tersebut terlihat dalam pasal dalam Undng-Undang Merek sebagai berikut: Pasal 56:

- (1) Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, aktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
- (2) Indikasi-geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:
 - a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
 1. pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 2. produsen barang hasil pertanian;
 3. pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
 4. pedagang yang menjual barang tersebut;
 - b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
 - c. kelompok konsumen barang tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi pengumuman permohonan pendaftaran indikasi-geografis.
- (4) Permohonan pendaftaran indikasi-geografis ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila tanda tersebut:
 - a. bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber,

⁶<http://sarungsutradonggalapalu.blogspot.com/>.

Diunggah 4 januari 2014.

⁷Lihat Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta atau Lagu*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 14, seperti dikutip dalam Afrillyanna Purba, dkk, *Opcit*, hlm. 1.

⁸*Ibid*, hlm. 78.

⁹*Ibid*.

proses pembuatan, dan/atau kegunaannya;

b. tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai indikasi-geografis.

(5) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek.

(6) Ketentuan mengenai banding dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Indikasi-geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut masih ada.

(8) Apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi-geografis, suatu tanda telah dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi-geografis.

(9) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran indikasi-geografis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57:

(1) Pemegang hak atas indikasi-geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi-geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

(2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta

memerintahkan pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Pasal 58

Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam BAB XII Undang-undang ini berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan hak atas indikasi-geografis.

Pasal 59:

Indikasi-asal dilindungi sebagai suatu tanda yang:

- a. memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1), tetapi tidak didaftarkan; atau
- b. semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

Indikasi Sumber atau Indikasi Asal (*Indication of source*) adalah istilah yang dipakai dalam perjanjian Madrid 1891 tentang penghapusan Indikasi Sumber Barang yang Salah atau Sehat. Perjanjian ini tidak menyatakan arti indikasi sumber secara eksplisit. Meskipun demikian, perjanjian ini me-negaskan adanya keharusan untuk menyita setiap barang yang memakai Indikasi Sumber yang salah atau menyesatkan. Jadi, setiap Indikasi Sumber harus secara jelas merepresentasikan tempat asal dari barang terkait. Definisi Indikasi Sumber yang bersifat eksplisit sendiri dapat ditemukan dalam permohonan komentar atas berbagai wacana yang dikemukakan dalam Proses Nama Domain Internet WIPO ke-2. Dalam permohonan ini, Indikasi Sumber didefinisi sebagai sebuah tanda dari Negara atau tempat yang merupakan asal suatu barang.¹⁰

Pelanggaran Indikasi Asal pun diberikan sanksi pidana, yaitu pada Ketentuan pidana terhadap pelanggaran Hak Merek terdapat dalam Bab XIV Pasal 92 dan 93 undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu :

Pasal 92:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis

¹⁰Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 47-48.

milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2)Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis

(3)Milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(4)Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 93:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Tindak pidana-tindak pidana yang berkaitan dengan merek, indikasi geografis atau indikasi asal sebagaimana dimaksud diatas merupakan delik aduan. Pemerintah Kabupaten Donggala belum mengatur secara khusus mengenai perlindungan Sarung Donggala kedalam peraturan perundangan-undangan dan hanya berpedoman pada undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatur tentang Indikasi Geografis dan Indikasi Asal. Sarung Donggala dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013, hanya termasuk kedalam program khusus percepatan pembangunan daerah yaitu dibidang industri yang diarahkan untuk menumbuhkan kawasan-kawasan industri kecil dan menengah di wilayah Donggala seperti kawasan industri tenunan sarung Donggala.

C. Perlindungan Sarung Donggala Sebagai Indikasi Asal

Sarung Donggala termasuk rezim Indikasi Asal karena menggunakan nama tempat atau daerah asal produk tersebut dan menjadi ciri khas daerah tersebut. Sehingga harus perlu dilindungi sebagai produk asli daerah kabupaten Donggala sehingga tidak terjadi penjiplakan atau pelanggaran. Perlindungan hukum untuk rezim indikasi asal tidak diatur secara spesifik dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, namun perlindungannya dapat dilihat dalam Pasal yang mengatur tentang Indikasi Geografis, karena indikasi asal dan indikasi geografis memiliki pengertian yang sama yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, namun perbedaannya indikasi geografis didaftarkan dan indikasi asal tidak didaftarkan atau hanya semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan, sebagai berikut:

1. Kain tenun Donggala atau sarung Donggala merupakan salah satu hasil kerajinan tradisional Kabupaten Donggala yang sudah terkenal di seluruh Nusantara.
2. Sarung Donggala termasuk kedalam rezim Indikasi Asal karena menggunakan nama tempat atau daerah asal produk tersebut dan menjadi ciri khas daerah tersebut sebagai prinsip Indikasi Asal yang dilindungi sebagai tanda. Indikasi Asal dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut,

memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan, tetapi tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukan asal suatu barang atau jasa.

B. Saran

Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Donggala lebih memperhatikan keberadaan Sarung Donggala dan melestarikannya agar lebih dikenal diseluruh Indonesia sebagai salah satu produk Indikasi Asal yang merupakan produk asli Daerah Kabupaten Donggala yang menjadi ciri khas Kabupaten Donggala. Serta diharapkan kepada pihak Pemerintah Donggala melakukan perlindungan Hukum terhadap Produk Sarung Donggala kedalam sebuah peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang perlindungan Sarung Donggala agar tidak terjadi pelanggaran terhadap produk asli daerah Kabupaten Donggala.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, bandung.
- Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, Alumni, bandung.
- Afrillyanna Purba, dkk, 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia "Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Imam Soedjoko, 1992, *Pengantar Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Grafiis, Jakarta.
- Miranda Risang Ayu, 2006, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*", Alumni, bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)..
- Undang-Undang Republik Indonesia 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013.

C. Internet

- <http://sarungsutradonggalapalu.blogspot.com/>. Diunggah 4 januari 2014.

BIODATA

SARIANTI, Lahir di Labuan 6 Agustus 1986, Alamat Rumah Jalan Lantigau Nomor 136 Labuan Sul-Teng, Nomor Telepon +62853427010, Alamat Email

